PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ZAINI MUKHSIN**
2. Jabatan : **KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMENEP**
3. NHK : **1000455**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.525.000.000**

1. Tanah Seluas 387 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/54 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 8.099 m2 di KAB / KOTA SITUBONDO, Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 1.215 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 73.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ST WAGON Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 54.550.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 222.829.407**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**2.600.000**
	Sub Total	**Rp.**	**1.877.979.407**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**127.520.987**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.750.458.420**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.